

SEPINTAS KILAS TENTANG KALIMANTAN BARAT SEBAGAI WILAYAH PERBATASAN

Hasil liputan team wartawan SSW ke Kalbar
(Yohanes Wahyu dkk)

KALIMANTAN BARAT DALAM KILASAN

Dua jam tepat pesawat Bouraq yang membawa team liputan SSW menempuh jarak dari Bandara Sukarno-Hatta menuju ke Bandara Supadio di Pontianak. Begitu mendarat, terasa kondisi wilayah daratan Kalimantan pada umumnya, berawa dan panas lembab dengan suhu antara 22,9-31,05 derajat Celcius. Daerah Kalbar seluas 146.807 Km² terdiri dari pantai, rawa, dataran rendah, danau dan sungai serta dataran tinggi atau pegunungan. Batas wilayahnya terdiri dari wilayah Serawak/Malaysia Timur, Kalteng dan Kaltim, Laut Jawa dan Laut China Selatan.

Dengan wilayah yang sedemikian luas, transportasi dilayani oleh sarana perhubungan darat sepanjang 4.041 Km, perhubungan sungai sepanjang 2.451 Km, perhubungan laut antar pulau serta perhubungan udara yang menghubungkan kota Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Jakarta, Kuching dan Singapura.

Dalam perbandingan, nampaklah bahwa panjang jalan darat dengan luas wilayah belumlah seimbang, sehingga jalur transportasi sungai masih sangat dominan. Namun terasa mulai ada pergeseran dari sarana transportasi air/sungai ke transportasi darat. Hal tersebut adalah sebagai hasil nyata pemba-

ngunan yang terus dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari data yang dapat dikumpulkan, jumlah penduduk pada tahun 1992 tercatat: 3.234.766 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 22 jiwa/Km². Dilihat dari komposisi penduduk, terdiri dari suku bangsa Dayak 41 %, Melayu 39 %, China 12 %, dan lain-lain 8 % nampaklah bahwa di wilayah Kalbar terdapat cukup banyak suku bangsa China yang berdomisili di wilayah tersebut dan peranan mereka dalam bidang perekonomian berpengaruh besar.

Dari data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Kalbar termasuk heterogen, sehingga seringkali menimbulkan masalah adat, agama dan kesukuan yang seringkali menimbulkan masalah SARA.

Masalah kependudukan di wilayah Kalbar sangat erat dengan berbagai masalah tanah yang sedang diupayakan pemerintah, antara lain kebijaksanaan pemerintah dalam pemetaan kota untuk meningkatkan nilai guna tanah, karena cukup banyak tanah yang kurang jelas statusnya. Upaya pemerintah dalam mengembangkan perkebunan dan transmigrasi juga kadang-kadang terhambat karena masalah tanah.

Perkembangan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke-tahun serta terbatasnya lapangan kerja ditambah dengan semakin mengalmnya para pencari kerja dari Madura, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Jawa diperkirakan cukup menimbulkan permasalahan. Apalagi masalah ini cukup berpengaruh langsung dalam perembesan tenaga kerja ke luar negeri secara illegal yang cukup menggejolak akhir-akhir ini.

Selanjutnya, Kalbar kaya akan berbagai sumber kekayaan alam antara lain yang dapat



Tim Peliput "SSW" di perbatasan Kalimantan Barat.

dipetik dari pengolahan wilayah hutan seluas 9.204.000 Ha yaitu berupa kayu olahan, kayu lapis, tengkawang, rotan dan komoditi lainnya. Hal ini dengan sendirinya cukup merangsang para pengusaha lokal ataupun luar untuk berusaha di wilayah Kalbar. Namun pada saat sekarang ini mulai nampak adanya pergeseran dari pengolahan hasil hutan ke arah intensifikasi pengolahan perkebunan. Selain dari hasil hutan, Kalbar juga memiliki potensi cukup mengenai hasil tambang berupa minyak bumi, logam mulia, boksit, bahan keramik/pasir kuarsa dan sebagainya.

Penting juga diketengahkan bahwa dalam masalah penggalian bahan tambang ini cukup banyak diketemukan pertambangan emas secara liar yang diusahakan oleh masyarakat China, namun pada akhir-akhir ini mulai ditinggalkan, sejak adanya pengelolaan hutan yang pada kenyataan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak.

Di bidang pertanian menghasilkan berbagai tanaman pangan dan perkebunan berupa kelapa sawit, jeruk, kopi, coklat dan lada. Di balik berbagai kekayaan alam yang dimiliki wilayah Kalbar, terdapat kenyataan bahwa wilayah tersebut dalam hal sembilan bahan pokok masih tergantung dari wilayah lain, terutama beras, gula pasir dan bahan sandang. Kemudian pada saat-saat tertentu karena keterbatasan sarana transportasi dan faktor alam, daerah pedalaman sering mengalami kesulitan bahan pangan.

Wilayah Kalbar sebagai salah satu wilayah yang mempunyai perbatasan darat dengan negara lain dapat ditonjolkan karena mempunyai spesifikasi tersendiri. Kekhasan tersebut dapat diketengahkan antara lain sebagai berikut :

Panjang jalur perbatasan dibagian utara Kalimantan Barat memanjang dari barat ke timur sepanjang 870 Km, dengan luas perbatasan 47.526,27 Km atau 32,37% dari wilayah Kalbar. Daerah perbatasan tersebut meliputi Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Sedangkan desa yang langsung berhadapan dengan perbatasan sejumlah 526 desa.

Untuk mengawasi jalur perbatasan tersebut, telah didirikan 6 buah Pos Pengawasan

Perbatasan (Border Control Post = BCP), yaitu di Sajingan, Jagoi babang, Bantan, Sungai Udang, Sungai Antu dan Nanga Badau. Sedangkan untuk mengawasi jalur transportasi lintas batas telah dibentuk 9 buah LPE (Loading Post of Entry), yaitu di Sajingan, Siding, Seguma, Entikong, Sei Udang, Lanjak, Sei Antu, Badau dan Benua Martinus.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis telah melaksanakan berbagai langkah dan tahapan persetujuan yang menyangkut lintas batas tersebut, antara lain :

- Semua masalah lintas batas kedua negara (Kalbar - Serawak) diatur dalam permufakatan dasar lintas batas antara Indonesia - Malaysia yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 26 November 1968, permufakatan tersebut mengatur antara lain hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat perbatasan kedua negara untuk saling melintasi batas area tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Mei 1984, permufakatan tersebut di atas disempurnakan dengan kesepakatan bahwa masyarakat lain dapat melintasi batas tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

Penyempurnaan permufakatan tersebut di-realisasikan dengan pembukaan atau penyambungan jalan antara Entikong - Tebedu, dan tanggal 25 Februari 1991 telah diresmikan penggunaan lintas batas Entikong - Tebedu sebagai pintu masuk/keluar Malaysia - Indonesia.

- Namun kenyataannya, bahwa selain adanya Pos lintas batas Entikong - Tebedu tersebut, masih cukup banyak jalan setapak atau sungai yang dapat digunakan untuk menyeberang antar kedua negara namun sulit untuk diadakan pengawasan.

Selanjutnya dapat diperoleh informasi bahwa ketentuan perdagangan lintas batas (Amendment on Trade and economic Relation) yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 1987, berisi perjanjian tentang perdagangan lintas batas yang memuat antara lain :

- Dari Indonesia meliputi hasil pertanian dan hasil lainnya yang berasal dari daerah lintas batas, tidak termasuk mineral, minyak dan biji tambang.
- Dari Malaysia meliputi barang kebutuhan hidup sehari-hari termasuk perkakas, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk keperluan perindustrian di daerah lintas batas.
- Yang dibenarkan untuk melakukan perdagangan adalah penduduk/orang-orang yang bertempat tinggal di daerah lintas batas.
- Nilai barang yang dibawa/diangkut oleh setiap orang tidak melebihi 600 dollar Malaysia.

Dari berbagai gambaran tersebut diatas, nampaklah bahwa wilayah Kalbar mempunyai berbagai kekhasan yang harus menjadi perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri. Kekhasan tersebut antara lain dapat dirinci sebagai berikut:

- Mempunyai wilayah luas dan berbatasan darat dengan Malaysia.
- Adanya hubungan sosiologis antara penduduk wilayah perbatasan.
- Ketergantungan bahan tertentu dari daerah luar termasuk Malaysia.
- Masyarakat China memegang peranan penting dalam perekonomian di wilayah Kalbar.

IDENTIFIKASI KERAWANAN

Dari gambaran tersebut diatas nampaklah secara jelas bagaimana dan apa potensi yang dimiliki dan dikandung oleh wilayah Kalimantan Barat tersebut. Selaras dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai pembangunan disegala bidang, dapatlah diperkirakan berbagai kerawanan akan ikut menumpang dalam segi-segi positif langkah pembangunan yang dilaksanakan di seluruh lapisan wilayah tersebut.

Sangat diyakini bahwa seluruh jajaran pemerintahan telah melaksanakan berbagai antisipasi terhadap kemungkinan adanya dampak negatif pembangunan di wilayah tersebut. Dengan tidak mengurangi berbagai konsepsi yang telah dilahirkan oleh berbagai instansi di

wilayah Kalbar, dalam kesempatan ini dikedepankan pula rasa ikut memiliki dalam bentuk analisa singkat tentang kerawanan yang mungkin lahir di wilayah tersebut.

a. Masalah pemukiman.

Timbulnya berbagai pemukiman yang didasarkan oleh kelompok-kelompok sesuai dengan adat kebiasaan dan mata pencaharian masing-masing. Hal ini mengakibatkan kurang membaurnya masyarakat yang heterogen tersebut sehingga dapat diperkirakan secara cepat akan mampu memancing timbulnya masalah SARA. Dan kalau diamati nampak perbedaan yang cukup menyolok dalam pola kehidupan dari para penghuni permukiman tersebut, ada yang sangat mewah dan di balik itu ada yang sangat miskin, sehingga secara sepintas kilas dapat diketahui adanya berbagai kantong-kantong kemiskinan. Kondisi ini dapat diakibatkan pula oleh adanya polarisasi dari kedua kelompok tersebut di atas dalam menanggapi berbagai perkembangan pengetahuan dan teknologi untuk kebutuhan kehidupannya.

Hal tersebut dengan sendirinya akan berpengaruh dalam tingkat pendapatan maupun kemampuan. Semakin kedua belah pihak tidak menyadari kerawanan yang dikarenakan oleh kesenjangan itu, maka deviasi kemampuan dari kedua kelompok tersebut akan semakin melebar. Akibat yang jelas adalah timbulnya berbagai macam bentuk kecemburuan sosial yang mengarah kepada bentuk perilaku frustrasi, agresi dan pada saatnya akan meningkat menjadi berbagai bentuk perbuatan kriminal. Di sinilah dapat diketahui bagaimana hubungan atau kaitan antara kemiskinan dengan timbulnya gangguan Kamtibmas dalam bentuk kriminalitas.

Didasari oleh suatu kerangka teori tentang hubungan manusia dan kejahatan/kriminalitas yang mengacu pada kenyataan bahwa masyarakat di Kalimantan Barat sekarang ini sedang bergerak menuju kepada suatu era kemajuan atau modernisasi di segala sisi kehidupan. Seorang pakar Patologi sosial DR. Kartini Kartono mengetengahkan pada bukunya Patologi Sosial bahwa masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi material tinggi, dan sering

disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Ungkapan pakar tersebut dapat disederhanakan bahwa dalam masyarakat yang sedang berkembang tersebut, dambaan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sangat banyak dan bercorak ragam. Sedangkan kemampuan yang dimilikinya untuk meraih kebutuhan tersebut kurang memadai, sehingga timbullah berbagai cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan cara yang tidak wajar. Kondisi inilah yang mendorong individu melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain terjadilah diskrepansi atau ketidaksesuaian antara ambisi dengan kemampuan pribadi. Lebih jauh lagi, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi personal, maka dikatakan oleh pakar tersebut akan menimbulkan apa yang disebut dengan "Maladjustment" ekonomi (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis) yang akan mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

Kalau akar permasalahan timbulnya gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah Kalbar secara benar dapat dikupas dengan pendekatan kerangka teori tersebut, maka penyelesaiannya pun akan menjadi kompleks dan berkait antar instansi. Di sinilah masalah keterpaduan secara benar harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya antar instansi yang terkait. Dan kalau mau diakui secara jujur, maka sebenarnya masalah tersebut bukanlah urusan pihak atau instansi Kepolisian saja namun merupakan kepentingan semua pihak. Kesemuanya harus berupaya secara konseptual dan dilaksanakan secara nyata untuk mencegah timbulnya deviasi yang semakin melebar. Sebenarnya berbagai cara telah ditempuh oleh masyarakat ataupun pemerintah melalui berbagai kelembagaan formal dan informal, tetapi dalam kenyataannya kecenderungan deviasi semakin melebar. Dalam konsepsi dan actionplannya senantiasa didengungkan masalah keterpaduan, tetapi kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya upaya yang berjalan sendiri-sendiri. Mengapa hal ini terjadi, sebenarnya masing-masing dapat melakukan intropeksi untuk mencari penyebabnya, kemudian secara sadar memecahkannya.

b. Masalah perbatasan Kalbar - Serawak.

Memang dari gambaran terdahulu telah diuraikan berbagai langkah/upaya kedua negara untuk merealisasikan permufakatan/kesepakatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama penduduk yang berada disekitar jalur perbatasan. Namun perlu dipertanyakan, tidakkah kondisi ini juga ada yang memanfaatkan untuk kepentingannya secara pribadi secara illegal?

Kalau pertanyaan tersebut dijawab dengan sejujurnya, pastilah jawabannya adalah YA. Berbagai indikasi yang mengarah kepada pemanfaatan tata atur lintas batas tersebut secara nyata dapat diketahui dengan beredarnya berbagai macam hasil industri ataupun pertanian yang mampu berada dikedua wilayah dengan menghindari dari ketentuan yang berlaku (pabean).

Hal yang sama sebenarnya dapat diketahui melalui pendekatan kepentingan politik dan keamanan.

Melalui pendekatan kepentingan ekonomi, kedua negara telah berupaya menciptakan keseimbangan sesuai dengan kemampuannya. Yang pasti jalan lintas batas telah terealisasi dengan baik, sehingga mampu menciptakan kondisi arus lalu lintas yang sangat memadai, hanya sekarang yang perlu dikembangkan adalah berbagai unsur penopangnya. Kalau hal ini tidak diperhatikan dengan seksama, maka dapat diperkirakan arus lintas batas dengan membawa berbagai komoditi akan berjalan dengan tidak seimbang. Dapat diperoleh keterangan yang patut dipercaya bahwa pihak Malaysia telah berupaya membangun penopang lintas batas tersebut melalui pembangunan pasar yang cukup besar, sedangkan pihak Indonesia belum nampak tanda-tanda kearah itu. Bilamana nantinya pasar besar tersebut selesai dibangun, dapat diperkirakan arus lintas batas akan lebih menguntungkan pihak Malaysia tentunya.

Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah Indonesia segera mengantisipasinya dengan pola yang sama seperti halnya P. Batam dengan Singapura, tentunya dengan berbagai penyesuaian mengacu kepada kondisi setempat.

Kalau mau dikaitkan lagi dengan berbagai fasilitas yang menopang kesejahteraan masyarakat perbatasan, maka berbagai kekurangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah Indonesia, antara lain pendidikan, kesehatan, transportasi dan penerangan (TV). Masalah ini berulang kali diulas oleh mass media, namun langkah yang diambil oleh pemerintah belum berimbang atau sesuai dengan harapan (Kompas, 6 Februari 1995, Melongok perbatasan Kalbar-Serawak).

Untuk menghindari berbagai permasalahan yang akan dengan cepat berkembang secara negatif, sebaiknya pemerintah Indonesia segera mengantisipasinya dengan pola yang sama seperti halnya P. Batam dengan Singapura, tentunya dengan berbagai penyesuaian yang mengacu kepada kondisi setempat.

c. Masalah tenaga kerja.

Pada saat sekarang ini, masalah tenaga kerja menjadi bahan pembicaraan yang cukup menarik. Wilayah Kalbar dengan berbagai potensi wilayah yang dimilikinya cukup merangsang para pencari kerja untuk berbondong-bondong hijrah menuju wilayah tersebut dengan tujuan mencari pekerjaan. Namun ternyata masalah pekerjaan di Kalbar merupakan hal yang cukup meresahkan, masih cukup banyak penganggur ataupun bekerja secara tidak tetap dengan penghasilan yang relatif kecil, sehingga kurang mencukupi pada strata kehidupan rata-rata. Karena rasa senasib dan sepenanggungan dari para pekerja yang berpenghasilan kecil, kemudian juga diikat rasa solidaritas sosial karena asal suku bangsa, berkumpul mereka membentuk daerah miskin.

Masalah ketenagakerjaan ini, jika dikaitkan dengan adanya berbagai rangsangan penghasilan tinggi yang berasal dari wilayah Malaysia, dapat mendorong para pencari kerja berupaya secara legal ataupun ilegal untuk pergi ke Malaysia untuk mengadu nasib. Di sinilah mulai timbul berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh para aparat keamanan yang berada di perbatasan ataupun perkotaan.

Para aparat pemerintah di Perbatasan akan menghadapi berbagai modus operandi dari

para pencari kerja ataupun otak pengaturnya yang berupaya menerobos perbatasan secara efisien atau menguntungkan sebanyak-banyaknya. Kesulitan dari para petugas juga disebabkan banyaknya jalan terobosan yang dapat ditempuh oleh para pencari kerja tersebut. Namun sebenarnya, pola pengiriman tenaga kerja ilegal tersebut dapat berawal dari perencanaan di kota-kota oleh para otak pengaturnya. Di sinilah perlunya kelancaran arus telekomunikasi dari perkotaan ke daerah perbatasan dalam rangka mendeteksi secara awal setiap rencana pengiriman tenaga kerja ilegal.

Dan kenyataan juga bahwa para pencari kerja ini akan menjadi obyek dari para aparat pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi, baik didalam maupun diluar negeri (Kompas, Senin 13 Februari 1995 hal 2, TKI di Sarawak jadi sasaran pemerasan). Hal ini dapat dicegah dengan terciptanya koordinasi yang baik antar kedua negara.

d. Masalah transportasi.

Masalah yang tidak kalah pentingnya dalam peranan pengembangan wilayah Kalimantan barat adalah masalah transportasi darat. Pada tulisan ini, masalah lalu lintas difokuskan pada masalah lalu lintas yang menghubungkan antara Pontianak menuju ke perbatasan Entikong.

Secara jujur patut pembangunan jalur jalan dari kedua posisi tersebut dalam kondisi mulus dan sangat memadai untuk waktu sekarang sehingga patut diacungi jempol. Namun kalau dicoba menyusun suatu prediksi untuk kurun waktu 10 tahun mendatang, maka kondisi tersebut perlu disempurnakan, apalagi dalam menyongsong era pembangunan ekonomi global dari kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Mengapa hal ini perlu menjadi prioritas pembangunannya?

Suatu pemikiran wajar, bahwa urat nadi perekonomian yang relatif murah dan dapat dinikmati oleh setiap orang adalah jalan darat. Apalagi jalan tersebut merupakan urat nadi antara dua negara yang sedang membangun. Kedua negara tersebut akan dapat saling memanfaatkan secara positif baik dari pendekatan kesejahteraan ataupun keamanan.

Pembangunan jalan tersebut akan sangat berpengaruh besar bagi pembangunan kota, desa ataupun pemukiman yang dilaluinya.

Mengacu kepada pemikiran yang dilahirkan dalam Forum Sarasehan dalam rangka Peringatan Ke III Validasi Direktorat Lalu lintas Polri tahun 1994 di Jakarta pada tanggal 8 November 1994. Direktur Lantas Polri mengemukakan suatu kesimpulan antara lain bahwa pola penegakan hukum lalu lintas secara tegas, bertahap dan konsisten serta berkesinambungan sesuai ketentuan sanksi UU No. 14/1992 melalui Sistem Potensial Point Target (SPPT) pada ruas-ruas jalan tertentu dan selanjutnya makin diperluas perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan. Pemikiran ini sebenarnya juga dapat diterapkan pada jalur Pontianak - Entikong.

Yang tidak kalah pentingnya pada materi penyataan Direktur lalu lintas adalah bahwa kesadaran akan luasnya masalah yang dihadapi memiliki lingkup lintas sektoral mewajibkan Polri khususnya Polantas untuk senantiasa konsisten pada pendekatan kemitraan dan koordinasi dengan instansi terkait, baik dengan wadah maupun tanpa wadah "Traffic-board".

Pada saatnya nanti, pada pelaksanaan pengembangan pembangunan jalan Pontianak-Entikong sewajarnya perlu mengacu antara lain kepada kedua kebijaksanaan tersebut diatas dengan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan dan keamanan secara seimbang.

PENUTUP

Tulisan ini didasarkan pengamatan dan referensi yang dikumpulkan oleh penulis secara terbatas sehingga sangatlah mungkin bahwa hasil analisa ini bersifat sumier, apalagi jika dibandingkan berbagai hasil penelitian atau kajian yang dilakukan oleh para pakar ataupun instansi yang berwenang.

Pada saat pengamatan wilayah oleh team peliput SSW yang didukung oleh berbagai penjelasan dan referensi dari para pejabat

yang berwenang, memang telah dirasakan adanya berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kerawanan yang dihadapi oleh wilayah Kalbar pada masa mendatang.

Berbagai temuan yang diketengahkan dalam pembahasan tersebut diatas, sama sekali tidak bermaksud mengurangi apa yang telah atau mungkin ditemukan oleh pemikiran pada tahap-tahap terdahulu, namun pada dasarnya hanyalah didorong untuk turut serta dalam menyampaikan sumbang pikir. Pada akhirnya, semoga apa yang diketengahkan ini mampu memberikan manfaat, terutama bagi yang berkepentingan secara langsung dengan pengelolaan wilayah Kalbar.

Lembang, Pebruari 1995.

Referensi :

1. Bonger, Prof.Mr.W.A., Pengantar tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
2. Kartini Kartono. Dra., Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
3. Syahrir, Analisis Ekonomi Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
4., Situasi dan Faktor Dominan Yang berpengaruh terhadap gangguan Kamtibmas di Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Pontianak, 1994.
5., Keterpaduan antar Polda se Kalimantan dibidang operasi dan informasi dalam menanggulangi perkembangan gangguan Kamtibmas dimasa yang akan datang, Polda Kalbar, Pontianak, 1994.
6., Rumusan Hasil sarasehan dalam rangka peringatan Ke III validasi Dit. Lantas Polri tahun 1994, Dit. Lantas Polri, Jakarta, 1994.

(Kol. Pol. Drs. Y. Wahyu Saronto
adalah Kadep Strategi Sespim Polri.)